

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN III**

2025



**KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan, Jawa Timur 62281,
Telepon, (0322)322369, Faksimile (322369), Pos-el tikung@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, Desember 2025

Nomor : 700.1.2.7/4³⁶/ 413.323/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2025 Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan.

Kepada
Yth. Bupati Lamongan

di
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan III Tahun
2025 Kecamatan Tikung sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Tikung
Kabupaten Lamongan



Sujirman Sholeh, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
19720909 200112 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan Jawa Timur 62281,
Telepon, (0322)322369, Faksimile (322369), Pos-el tikung@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : **700.1.2.7/ 436/413.323/2025**

TANGGAL TERBIT : **Desember 2025**

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Disiapkan Oleh | : | <p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Tikung</p> <p></p> <p><u>SAPTINA KUNHAYATI MAHANANI, S.P, M.M</u> NIP. 19790910 201406 2 005 Anggota</p> |
| Diperiksa | : | <p>Sekretaris Kecamatan Tikung</p> <p></p> <p><u>NURASAN, S.Sos.</u> NIP. 19691231 200312 1 029 Koordinator</p> |
| Disahkan Oleh | : | <p>Camat Tikung</p> <p></p> <p><u>SUJIRMAN SHOLEH, S.E., M.M.</u> NIP. 19720909 200112 1 002 Ketua</p> |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III

Kecamatan Tikung telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir.



| Search now | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Urusan Pemerintahan | | Lainnya | | | | |
| Dinas Terkait | | Kecamatan Tikung | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | |
| 1 | Pengikatan kualitas jaringan dan sarpras, Melakukan perawatan secara intensif dalam pemakaian sarpras | Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan | Camat, Seccam dan Kasi Pelayanan Publik | Januari - Juni 2025 | Juni 2025 | Sudah dilaksanakan |
| 2 | Peningkatan peran pendamping desa | Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan | Camat, Seccam dan Kasi PPM | Juni -Juli 2025 | Juli 2025 | sedang dilaksanakan |
| 3 | Meningkatkan pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa | Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan | Camat, Seccam dan Kasi Pemerintahan | Juni - Juli 2025 | Juni -Juli 2025 | sedang dilaksanakan |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan | Camat, Seccam dan Kasi Pemerintahan | Juni 2025 | Juli 2025 | sudah dilaksanakan |
| 5 | Patroli Rutin serta meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan. | Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan | Camat, Seccam dan Kasi Trantibum | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Sedang dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | |
| 1 | Melakukan Evaluasi Data | Monitoring,Evaluasi dan dilakukan pengecekan secara langsung | Camat, Seccam dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan | Juni 2025 | Juni 2025 | sudah dilaksanakan |
| 2 | melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan | Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan | Camat, Seccam dan Seksi PPM | Mei - Juni 2025 | Juni 2025 | Sudah dilaksanakan |
| 3 | Peningkatan Kapasitas | Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan | Camat, Seccam dan Seksi Pelayanan Publik | Mei - Juni 2025 | Juni 2025 | sudah dilaksanakan |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III

Kecamatan Tikung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah



INSPEKTORAT

KABUPATEN LAMONGAN

Search now

| | | | Terjadi | Sebab | Dampak | | | RTP | RTP | |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|---|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan E-KTP , KK dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan Standar Pelayanan | RSO.25.99.62.01 | Juni 2025 | Server, Jaringan IT Lokal / Nasional Terbatas Listrik padam sewaktu waktu Masa usia peralatan yang sudah tua | Terhambatnya Pelayanan Masyarakat | sudah dilaksanakan | Pengikatan kualitas jaringan dan sarpras, Melakukan perawatan secara intensif dalam pemakaian sarpras | Januari - Juni 2025 | Juni 2025 | Sudah dilaksanakan |
| 2 | Berkurangnya Rasa Gotong Royong di Masyarakat dan Kepemudaan | RSO.25.99.62.02 | Juli 2025 | Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kepemudaan Modernisasi, globalisasi dan Bersikap Individu | Munculnya sifat egois sehingga lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan banyak orang Kurangnya kemampuan dalam bekerja sama sebagai sebuah kelompok Pudarnya rasa solidaritas antar sesama individu. | sedang dilaksanakan | Peningkatan peran pendamping desa | Juni -Juli 2025 | Juli 2025 | sedang dilaksanakan |
| 3 | Terlambatnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan data-data yang diperlukan | RSO.25.99.62.03 | Juni - Juli 2025 | Masih kurang tertibnya perangkat desa membuat laporan | Keterlambatan dalam pelaporan adminstrasi dan keuangan pemerintahan desa ke Dinas terkait (Dinas PMD Kabupaten Lamongan) | sedang dilaksanakan | Meningkatkan pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa | Juni - Juli 2025 | Juni -Juli 2025 | sedang dilaksanakan |
| 4 | Kegiatan rapat koodinasi dengan aparatur desa belum optimal | RSO.25.99.62.04 | Juli 2025 | Tingkat disiplin aparatur desa yang masih rendah Kurang kesadaran akan pentingnya disiplin | Penyelenggaraan pemerintahan desa kurang maksimal | sudah dilaksanakan | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Juni 2025 | Juli 2025 | sudah dilaksanakan |
| 5 | Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan | RSO.25.99.62.05 | Januari - Desember 2025 | Adanya pelaksanaan kegiatan masyarakat yang tidak berizin Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah | Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat | sedang dilaksanakan | Patroli Rutin serta meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan. | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Sedang dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | | | | | |
| 1 | Kelengkapan data pendukung perencanaan dan evalusi belum lengkap | ROO.25.99.62.01 | Juni 2025 | Kurangnya ketelitian pegawai | Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal | Sudah dilaksanakan | Melakukan Evaluasi Data | Juni 2025 | Juni 2025 | sudah dilaksanakan |
| 2 | Monitoring dan evaluasi Dana Desa Tahap II Tahun 2024 belum dilaksanakan | ROO.25.99.62.02 | Juni 2025 | Banyaknya kegiatan lain yang harus dilaksanakan | Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal | Sudah dilaksanakan | melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan | Mei - Juni 2025 | Juni 2025 | Sudah dilaksanakan |
| 3 | Tugas kepala seksi pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal karena penyusunan program kerja tahun 2024 dan tahun 2025 belum dibuat | ROO.25.99.62.03 | Juni 2025 | Kepala seksi pelayanan publik tidak memahami ketentuan yang berlaku , sehingga berakibat tidak adanya acuan pelaksanaan tugas seksi pelayanan publik | Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan kurang Maksimal | Sudah dilaksanakan | Peningkatan Kapasitas | Mei - Juni 2025 | Juni 2025 | sudah dilaksanakan |

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil sehingga pelayanan masyarakat kurang maksimal. Adanya kekurangan staf pada seksi trantibum sehingga pelayanan di lapangan kekurangan tenaga.

Hambatan-Hambatan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi pihak terkait dan mengusulkan penambahan staf untuk seksi trantibum.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melakukan sesuai rencana.